

**STUDI ANALISIS PANDANGAN A.M. SAEFUDDIN  
TENTANG REALISASI NILAI-NILAI DASAR SISTEM  
EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**AHMAD ZAKIYYUDIN  
082411004**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2015**

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.  
Dusun Longok Rt/Rw 004/001  
Kelurahan Donosari Patebon Kendal 51353

H. Ahmad Furqon, Lc, M.A.  
Perum Jatisari Asabri Blok D.6 No.27 Rt/Rw 09/10  
Jatisari Mijen Kota Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Eks Naskah  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n Sdr. Ahmad Zakiyyudin

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Walisongo Semarang**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : AHMAD ZAKIYYUDIN

NIM : 082411004

Jurusan : Ekonomi Islam

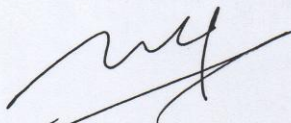
Judul Skripsi : **“STUDI ANALISIS PANDANGAN A.M. SAEFUDDIN  
TENTANG REALISASI NILAI – NILAI DASAR SISTEM  
EKONOMI ISLAM DI INDONESIA”.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

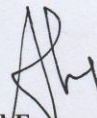
Pembimbing I



**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**  
NIP : 19710830 199803 1 003

Semarang, 8 Juni 2015

Pembimbing II



**H. Ahmad Furqon, Lc, M.A.**  
NIP : 19751218 200501 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

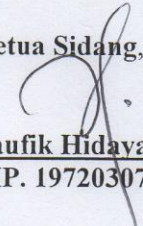
Skripsi saudara : Ahmad Zakiyyudin  
NIM : 082411004  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **STUDI ANALISIS PANDANGAN A.M. SAEFUDDIN  
TENTANG REALISASI NILAI-NILAI DASAR  
SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

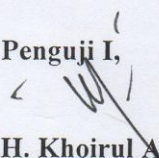
**25 Juni 2015**

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Strata I tahun akademik 2014/2015

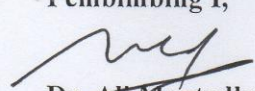
Ketua Sidang,

  
Taufik Hidayat, Lc., M.S.  
NIP. 19720307 200604 1002

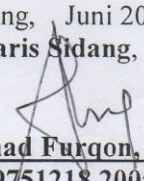
Penguji I,

  
H. Khoirul Anwar, M.Ag  
NIP. 19690420 199603 1 002

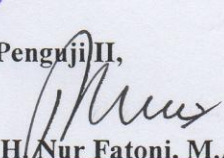
Pembimbing I,

  
Dr. Ali Murtadho, M.Ag  
NIP. 19710830 199803 1003

Semarang, Juni 2015  
Sekretaris Sidang,

  
H. Ahmad Furqon, Lc, MA  
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji II,

  
H. Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II,

  
H. Ahmad Furqon, Lc, MA  
NIP. 19751218 200501 1 002

## MOTTO

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ  
(البقرة: ٢٧٦)

Artinya: Allah menghapuskan (berkat) riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyukai (mengasihi) tiap orang dalam kekafirannya lalu berbuat dosa. (QS. al-Baqarah: 276).\*

---

\*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 70.

## **PERSEMBAHAN**

*Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya semata. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.*

*Alhamdulillah dengan ungkapan rasa kasih sayang ingin kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ( Bapak H. Abdul Basir Lutfi dan Ibu Hj. Umi Muarofah ) serta kakak ku Afidatun Nadhifah, Spd.I terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan cinta untukku yang senantiasa mengiringi langkahku....*

*Untuk yang special dalam hidupku Aty' Dina Nasikha yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa menjadi pendamping hidupku. Amin.. temen – temen EIA'08, Keluarga besar PAC. IPNU – IPPNU Kec. Kangkung dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kalian telah memberikan warna warni dalam hidupku. Dan tak lupa kepada Almamaterku sebagai wujud terima kasih dan khidmahku.*



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2015



Ahmad Zakiyyudin  
NIM: 082411004

## ABSTRAK

A.M. Saefuddin adalah salah seorang ekonom yang memiliki pandangan tentang ekonomi Islam. Konsep dan gagasannya tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam sejalan dengan pandangan al-Qur'an dan hadits. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam? Bagaimana realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data primer adalah buku Ahmad M. Saefuddin yang berjudul: 1) *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*; 2) *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*; 3) *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi..* Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut A.M. Saefuddin nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam ada tiga, yang pertama yaitu nilai dasar pemilikan; kedua, keseimbangan; dan ketiga, keadilan. *Pertama*, nilai dasar pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. *Kedua*, nilai dasar keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). *Ketiga*, nilai dasar keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat infak, sedakah. Walaupun pendapat A.M. Saefuddin tentang zakat sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam belum sepenuhnya direalisasikan di Indonesia, karena tidak ada unsur zakat di dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi Pemerintah Indonesia. Namun zakat sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Pendapat A.M. Saefuddin tentang pelarangan riba sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam, tampaknya sudah direalisasikan. Hal itu terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah, kontrak syariah, perseroan syariah, investasi syariah, reksadana syariah, dan aktivitas ekonomi lainnya dengan perspektif syariah.

Kata Kunci: A.M. Saefuddin, Nilai-Nilai, Dasar, Sistem Ekonomi, Islam

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“STUDI ANALISIS PANDANGAN A.M. SAEFUDDIN TENTANG REALISASI NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Pgs Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H.Ahmad Furqon, Lc, MA selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
6. Ketua perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Institut beserta staf, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkanku, atas segala kasih sayang serta do’anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putranya.



8. Sahabat-sahabatku seperjuangan jurusan El angkatan 2008, Cholid Ardian, Ahmad Alwi, M. Taufiqurrahman, Aldo Dhohiri terimakasih atas segala dukungan dan perhatiannya yang di berikan kepada penulis.

Atas semua itu, penulis hanya bisa berdoa semoga amal baik mereka di terima Allah SWT sebagai amal shaleh yang mudah-mudahan mendapatkan balasan yang melimpah dari-Nya. Karena penulis tidak bisa memberikan balasan apapun hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi yang sifatnya sederhana ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Mei 2015

Penulis,

**Ahmad Zakiyyudin**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II : NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM**

A. Pengertian Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam.....	17
B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	30
C. Ciri-ciri Ekonomi Islam .....	38
D. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional .....	42

### **BAB III: A. M. SAEFUDDIN TENTANG NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM**

A. Biografi A. M. Saefuddin, dan Pendapat-pendapatnya tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam.....	44
1. Biografi A. M. Saefuddin .....	44
2. Karya-Karyanya .....	46

B. Pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam .....	53
1. Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam .....	53
2. Nilai-nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam .....	57
<b>BAB IV : ANALISIS PENDAPAT A.M. SAEFUDDIN TENTANG NILAI- NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM</b>	
A. Analisis Pendapat A.M. Saefuddin tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam .....	66
B. Realisasi Pendapat A.M. Saefuddin tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam di Indonesia .....	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-saran .....	94
C. Penutup .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembahasan Sistem Ekonomi Islam telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemerhati ekonomi Islam. Namun/pembahasan yang dilakukan, terfokus pada ekonomi Islam secara umum atau yang dihubungkan dengan sistem kapitalis dan sosialis, seperti pada buku-buku yang ditulis oleh M. A. Mannan, dan Syed Nawab Hedar Naqvi.

Beberapa pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Islam yang dihubungkan dengan ekonomi Indonesia, khususnya di saat terjadi krisis global dewasa ini, sebagaimana dikemukakan Saefudin Noer bahwa "banyak negara saat ini melihat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan referensi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi saat ini". Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendri Saparini bahwa krisis global merupakan kesempatan untuk memunculkan sistem ekonomi Islam yang menawarkan sistem yang lebih menjanjikan untuk mengobati atau menggantikan sistem yang ada.<sup>1</sup>

Pembahasan tentang ekonomi Islam dan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat pada artikel Mubyarto dalam Jurnal Ekonomi Kerakyatan yang berjudul, "Penerapan ajaran ekonomi Islam di Indonesia" serta "Etika, agama dan sistem ekonomi", yang mengemukakan bahwa:

Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, dan sistem ekonomi Pancasila yang dapat

---

<sup>1</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 9.

mencakup warga non Islam lah yang kiranya dapat dikembangkan. Sistem ekonomi Islam berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktik-praktik bisnis yang non Islami".<sup>2</sup>

Menurut Syauqi Ahmad Dunya, dunia Islam kontemporer (saat ini) pada umumnya dari ujung yang satu ke ujung yang lain masih berada dalam tahap kehidupan yang secara ekonomi dapat disebut “terbelakang” atau masih menghadapi bahkan paling merasakan dampak terburuk dari adanya problematika ekonomi dunia. Padahal secara faktual, sebenarnya mereka mempunyai sejumlah alternatif yang sangat dinamis untuk menentukan sendiri suatu sistem ekonomi yang representative (bersifat mewakili) bagi kondisi mereka. namun sayangnya tidak dimanfaatkan atau mungkin belum digunakan oleh mereka.<sup>3</sup>

Tepatlah apa yang dikatakan oleh M. Faruq an-Nabahan<sup>4</sup>:

Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syariah yang memberikan eksistensi sistem Islam di tengah-tengah eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tapi sistem ekonomi Islam lebih sebagai pandangan Islam yang kompleks hasil ekspresi akidah Islam dengan nuansa yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya, baik dalam konteks undang-undang kemasyarakatan, perpolitikan, atau perekonomian.

Diilhami oleh pendapat dan pemikiran beberapa pakar ekonomi Islam di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dihubungkan dengan sistem ekonomi di Indonesia saat ini.

Sebagaimana diketahui, Islam berbeda dari agama-agama lainnya, karena Islam dilandasi dengan iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam secara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>3</sup> Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2007, h. 16.

<sup>4</sup> M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 1.

bersama-sama, dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga dapat diinterpretasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subyek yang dipelajari dalam ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam.<sup>5</sup>

Dewasa ini ada dua sistem ekonomi yang dianut oleh umat manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi Kapitalis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Benua Amerika, Eropa Barat, dan beberapa negara di Benua Asia, sedangkan sistem ekonomi Sosialis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Eropa Timur dan beberapa negara Asia. Menurut sebagian pengamat ekonomi, khususnya ekonom muslim, saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut. Selain itu, dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya di satu sisi dan melahirkan negara-negara yang semakin miskin di sisi lain. Dengan kata lain, dengan menjalankan kedua sistem ekonomi tersebut melahirkan ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka kemudian muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003, h. 12.



alternatif.<sup>6</sup> Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*).<sup>7</sup> Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: ٣)

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Maidah: 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.

---

<sup>6</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 24.

<sup>7</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 14-

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip *tauhid*, *rub-biyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa).<sup>8</sup> Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).<sup>9</sup>

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory*. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

(1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).<sup>10</sup>

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil).<sup>11</sup> Sehubungan dengan itu A.M. Saefuddin menyatakan bahwa:

“Islam untuk ekonomi, atau ekonomi dalam Islam dapat digali dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW., yang berkaitan dengan ketentuan

---

<sup>8</sup> Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990, h. 15

<sup>9</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h 37-38

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 17

mengenai tingkah laku ekonomi dari manusia dan masyarakat, dalam kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa.<sup>12</sup> Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid meliputi: nilai-nilai dasar kepemilikan, nilai dasar keseimbangan, dan nilai dasar keadilan.<sup>13</sup> Sedangkan nilai-nilai instrumental Sistem ekonomi Islam meliputi: Zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara dalam sistem ekonomi.<sup>14</sup>

Masalahnya adalah, bagaimanakah mewujudkan nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam versi A.M. Saefuddin. Apakah nilai-nilai dasar itu sudah diwujudkan di Indonesia, dan bagaimana kenyataan pelaksanaannya saat ini di Indonesia.

Adapun sebabnya penulis memilih tokoh tersebut sebagai berikut: pertama, A.M. Saefuddin merupakan ulama/cendekiawan muslim yang sangat peduli terhadap masalah ekonomi Islam, dan beliau dikenal sebagai ekonom. Berbagai pemikirannya tersebar di berbagai karyanya.

Kedua, dengan mengungkap pemikiran tokoh tersebut diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep sistem ekonomi Islam. A.M. Saefuddin: ditilik dari segi sifat dan coraknya, pemikiran dan gagasannya tentang dasar sistem ekonomi Islam bertolak dari keahliannya dalam bidang ekonomi yang berdasar pada perpaduan pemikiran ekonom Islam dengan pemikiran ekonom Barat. Ia tampak berpegang pada kaidah yang umumnya dianut ulama yaitu: *al-muhafazah ala al-qadim al-shahih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah* (Memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik). Dengan kata lain, A.M. Saefuddin adalah salah seorang ekonom yang memiliki pandangan tentang ekonomi

---

<sup>12</sup> A.M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 2007, h. 11.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 20-23.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 25-35.



Islam. Konsep dan gagasannya tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam sejalan dengan pandangan al-Qur'an dan hadits.

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: *Studi Analisis Pandangan A.M. Saefuddin tentang Realisasi Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>15</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam?
2. Bagaimana realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama tokoh yang dijadikan kajian. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

---

<sup>15</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, h. 312.

Penelitian Syahbudi dengan judul: “Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia” (*Jurnal Hermeneia Kajian Islam Interdisipliner*). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi pada awal abad 21 ini khususnya pada persoalan ekonomi semakin menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah tidak terdapat lagi sistem ekonomi yang lebih baik, lebih efektif dan efisien di dalam menciptakan rasa keadilan? Di antara persoalan paling mendasar yang hingga kini dihadapi oleh sistem ekonomi kapitalis adalah persoalan kesenjangan dan pemerataan. Meskipun hal tersebut relatif masih dapat diatasi yakni dengan program-program sosial pemerintah atau dengan pengendalian kekuatan militer. Kemudian persoalan termarginalkannya agama dari aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme dihadapkan pada persoalan demokratisasi yang dipersimpangjalkan.

Pada konteks Indonesia, kenyataan tersebut semakin menimbulkan dilema. Di tengah penduduk yang mayoritas adalah Muslim, ketimpangan dan kemiskinan justru berbanding linear. Belum lagi jumlah hutang yang setiap tahunnya terus bertambah. Timbul satu kegelisahan bahwa orang-orang Islam secara tidak langsung dituntut untuk bertanggung jawab mencari solusi bagaimana membawa kondisi nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik. Menjadi bangsa yang independent dan bukan dependent, bangsa yang mandiri yang mampu menampilkan diri sendiri dan bukan menjadi bangsa yang lemah dan inferior. Perekonomian umat Islam Indonesia saat ini, masih terlalu jauh ketinggalan oleh perekonomian masyarakat non-muslim.

Semaraknya SEI dijadikan sebagai sistem alternatif ekonomi, sebenarnya tidak hanya melanda Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia Islam. Landasan yang paling kokoh tentunya selain merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits juga merujuk kepada perilaku nabi dan para sahabat serta tabi'in baik dari sisi pemikiran maupun

gerakan kelembagaan yang berhubungan dengan ekonomi. Pada dataran praksis, keinginan di berbagai tempat untuk melaksanakan SEI tentunya mengalami perbedaan-perbedaan. Sebab diyakini, perbedaan lokus, tempus dan situasi membawa konsekuensi pada perbedaan di dalam realitas-praktisnya. Oleh karena itu, melacak kesejarahan SEI tidak hanya berhenti pada masa Rasullullah SAW dan tiga generasi berikutnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat esensi dari sebuah kesejarahan adalah bersifat dinamis (baca: *continuity and change*). Dialektika antara SEI dengan realitas kekinian setidaknya memberikan harapan yang besar, bahwa SEI tidak berhenti hanya pada teks-teks dan wacana-wacana suci yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan.<sup>16</sup>

Penelitian Sugeng Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif” (*Jurnal Islamica*). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa krisis ekonomi berkepanjangan belum ada harapan untuk segera usai. Perdebatan para ahli ekonomi dengan berbagai asumsi dan sudut pandang terasa benar, tetapi solusi yang ditawarkan tidak pernah *mujarab*. Meskipun sering kita dengar dari para konseptor ekonomi dengan berbagai instrumen yang dimilikinya mengatakan “ini adalah satu-satunya cara”. Semua sekedar wacana, antar ekonom, pemegang legalitas, eksekutif dan pelaku bisnis dengan jalan masing-masing, sehingga tidak *nyambung*, bahkan saling bertentangan. Paradoks-paradoks kebijakan berhamburan diterapkannya tidak menyentuh sasaran. Kebijakan fiskal, moneter, JPS, penentuan harga, dan lain-lainnya selalu dimanfaatkan oleh yang kaya, kuasa dan menang. Hanya untuk memutuskan hubungan dengan IMF saja banyak ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan

---

<sup>16</sup> Syahbudi: “Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Hermeneia Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 April 2014, h. 2.

sehingga lolos dari kepentingan rakyat walau atas nama rakyat. Dari sini dibutuhkan kesalehan ekonomi.

Untuk mengembalikan kepada konsepsi dan perilaku ekonomi Islam sebagai instrumental Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun mental seperti yang dicontohkan oleh Abudzar yaitu tidak boros tetapi juga tidak menghambat peredaran sumber-sumber ekonomi. Sikap kesederhanaan dan pemerataan mengefektifkan fungsi kerakyatan dalam proses mekanisme perekonomian yaitu dengan cara meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat. Dengan demikian ekonomi kerakyatan akan bangkit dari interaksi ekonomi yang tidak terhambat karena idle capital yaitu banyak sumber-sumber ekonomi yang mengganggu/tersimpan.
2. Membangun mental penguasa atau pemegang kebijakan ekonomi seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu sikap jujur, amanah dengan konsepsi pemisahan kepentingan negara dan keluarga secara ketat.
3. Sistemisasi secara utuh bagaimana mekanisme moneter sebagai aliran darah perekonomian tidak terkontaminasi adanya *Gambling Economic System*.
4. Politik alokasi dalam anggaran yang menyertakan arus zakat sebagai instrumen negara dalam fungsi pertumbuhan pemerataan dan perlindungan terhadap pembangunan ekonomi.
5. Pengefektifan Zakat, Infak dan Sodaqoh (ZIS) bukan lagi kesadaran tanpa pengaturan tetapi harus ada Lembaga atau Badan yang mengelola sehingga memiliki “daya paksa” melalui undang-undang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sugeng Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2013, h. 82.

Skripsi yang berjudul *Hubungan Sistem Ekonomi Islam dengan Peranan Bank Sentral dalam Sistem Moneter Islam Menurut Muhamamd Umer Chapra*, disusun oleh Nur Zaini (NIM. 2196111). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa karena bank sentral Islam akan menjadi kemudi dari sebuah sistem yang secara keseluruhan beda dan menantang, ia tidak dapat menjadi penonton pasif atau pengikut jinak teknik konvensional. Ia harus memberikan peran keteladanan dan aktif dalam keseluruhan proses islamisasi dan evolusi yang berkelanjutan sistem perbankan, paling tidak sampai sistem itu menjadi baik dan kuat. Persis seorang ibu, ia harus memahami, menyiapkan kelahiran, menyuapi, mendidik, dan membantu sistem perbankan Islam berkembang.<sup>18</sup>

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu titik berat pembahasannya tentang peranan bank sentral, dan riba', sedangkan penelitian saat ini titik berat pembahasannya tentang realisasi nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Demikian pula penelitian di atas yang dikemas dalam *jurnal* masih bersifat umum, karena belum menjawab realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini

Adapun beberapa buku yang telah diterbitkan dan berhubungan dengan judul di atas dapat diketengahkan sebagai berikut:

*Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, yang disusun oleh Djazuli dan Yadi Yanwari. Di dalam buku itu disebutkan bahwa dewasa ini ada dua sistem ekonomi yang dianut oleh umat manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Sistem ekonomi Kapitalis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Benua Amerika, Eropa Barat, dan beberapa

---

<sup>18</sup> Nur Zaini, "Hubungan Sistem Ekonomi Islam dengan Peranan Bank Sentral dalam Sistem Moneter Islam Menurut Muhamamd Umer Chapra", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, h. 32, t.d.

negara di Benua Asia. Sedangkan sistem ekonomi Sosialis banyak dianut oleh negara-negara yang berada di belahan Eropa Timur dan beberapa negara Asia.

Menurut sebagian pengamat ekonomi, khususnya ekonom muslim, saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut. Selain itu, dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya di satu sisi dan melahirkan negara-negara yang semakin miskin di sisi lain. Dengan kata lain, dengan menjalankan kedua sistem ekonomi tersebut melahirkan ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka kemudian muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif.<sup>19</sup>

Persoalannya sekarang, apakah ajaran Islam tentang ekonomi bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi Islam? Uraian di bawah ini akan mencoba melukis-jelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah ajaran Islam tentang ekonomi bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi Islam? telah muncul beberapa pendapat, yang bila dirangkum terbagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ajaran Islam tentang ekonomi bisa dinyatakan sebagai sebuah sistem ekonomi, sedangkan pendapat lain menyatakan bukan sistem ekonomi tetapi hanya berupa norma ekonomi. Menurut M. A. Mannan, dikotomi itu lebih pada, apakah ekonomi Islam itu sebuah "sistem" atau sebuah "ilmu".<sup>20</sup> Sebelum memahami lebih jauh tentang sistem ekonomi Islam akan lebih baik bila

---

<sup>19</sup> Seorang ekonom berkebangsaan Perancis, Jacquen Austy, menyatakan bahwa jalan untuk menumbuhkan ekonomi tidak hanya terbatas pada dua sistem-Kapitalisme dan Sosialisme, melainkan ada sistem ekonomi lain yang lebih kuat, yakni sistem ekonomi Islam., Sedangkan Raymond Charles, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, menyatakan bahwa Islam telah menggariskan jalan kemajuan tersendiri”.

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermasa, 1992, h. 15.

mendeskripsikan terlebih dahulu tentang makna sistem ekonomi itu sendiri. Sistem berarti suatu keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan.<sup>21</sup> Dengan kata lain, sistem berarti sebuah totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, .saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Dengan pengertian sistem ini, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam tentang ekonomi dapat dikatakan pula sebagai sebuah sistem ekonomi. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam tentang ekonomi adalah ajaran yang bersifat integral, yang tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan. Selain itu, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah sistem ekonomi telah terpenuhi dalam ajaran Islam. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam sistem ekonomi Islam itu adalah: (1) sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian tersebut; (2) motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam sistem itu; (3) proses pengambilan keputusan; dan (4) lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya.<sup>23</sup>

*Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, yang dikarang oleh Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Dalam temuannya, penulis buku tersebut menjelaskan, tak seorang pun menyangkal tentang pentingnya studi ekonomi saat ini. Pertarungan yang terjadi di antara kedua blok Timur dan Barat, sebabnya kembali sebagian besar kepada sebab-sebab ekonomis. Problema pokok yang merepotkan kini, adalah apa yang diistilahkan dengan dunia

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Anonimous. *Ekonomi Pancasila untuk Mendukung Tinggal Landas dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jakarta: Lemhannas, 1989, h. 8.

<sup>23</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga ...*, h. 24-26.



ketiga, yang terdiri dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yakni problema kemunduran ekonomi dan perlunya menumbuhkan ekonomi. Kalau ekonomi Islam belum berperan sampai kini, tidak berarti kurang pentingnya ekonomi Islam. Sebab sebagaimana diketahui bahwa jauhnya ekonomi Islam dari arena, tidak lain karena terpecahnya dunia Islam dan jatuhnya sebagian besar dunia Islam ke bawah kekejaman penjajahan, yang berusaha sekuat tenaga menjauhkan syariat Islam, termasuk di dalamnya ekonomi Islam, dari penerapannya di negeri-negeri Islam yang mereka duduki.<sup>24</sup>

*Islam dan Pembangunan Ekonomi*, karya Umer Chapra. Dalam buku itu dikemukakan ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah: (1) memberikan kenyamanan kepada faktor manusia, (2) mereduksi konsentrasi kekayaan, (3) melakukan restrukturisasi ekonomi, (4) melakukan restrukturisasi keuangan, dan (5) rencana kebijakan strategis.

Di antara tindakan-tindakan kebijakan ini mungkin sudah sangat akrab bagi mereka yang sudah bergelut dalam literatur pembangunan. Akan tetapi, apa yang lebih penting adalah injeksi dimensi moral ke dalam parameter pembangunan material. Tanpa sebuah integrasi moral dan material seperti itu, barangkali tidak mungkin dapat diwujudkan adanya efisiensi atau pemerataan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980, h. 30.

<sup>25</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwani Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 85.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>26</sup> Karena itu dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan (*library research*) adalah salah satu penelitian melalui perpustakaan.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, alasannya karena hendak meneliti dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken*

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 1.

<sup>27</sup> Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, h. 24.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2012, h. 42

*words and observable behavior*"<sup>29</sup> (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>30</sup> Jenis penelitian ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, dan realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini. Sebagai pendekatannya menggunakan pendekatan normatif.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung, sedang sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

---

<sup>29</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm. 4.

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

- a. Data Primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Buku-buku yang dimaksud di antaranya Ahmad M. Saefuddin yang berjudul: 1) *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*; 2) *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*; 3) *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*.
- b. Data Sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini, antara lain: M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*; Taqyuddin an-Nabhani, *an Nidlam al-Iqtishad fi al-Islam*; Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukkadimah*; Adiwarmanto a. Karim, *Ekonomi Makro Islami*; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*; Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*; Jurnal Ekonomi Syariah, Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002; Masoud Ali Khan, *Islamic Economic System: a Practical 7 Beneficial Approach*, Journal the Pakistan Accountant, Vol. 38, Januari-Februari 2005.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pendapat A.M.

Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, dan realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,<sup>32</sup> peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>33</sup> Penerapan metode deskriptif analisis adalah dengan cara menguraikan dan menggambarkan pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, dan realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmali namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 206.

<sup>32</sup> Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, h. 419.

<sup>33</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15., Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2012, h. 3. M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka. Setia, 2009, h. 89.

Bab kedua berisi nilai-nilai dasar istem ekonomi Islam yang meliputi pengertian nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, ciri-ciri ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi islam dan konvensional

Bab ketiga berisi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-niai dasar sistem ekonomi Islam yang meliputi biografi A.M. Saefuddin, pendidikan dan karyanya, pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam (ekonomi dalam Islam, tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam, nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam).

Bab keempat berisi analisis pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam yang meliputi analisis pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai nilai dasar sistem ekonomi Islam, realisasi pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM

#### A. Pengertian Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam terdiri dari empat kata, yaitu nilai, sistem, Islam, dan ekonomi. Kata “nilai” merupakan tema baru dalam filsafat Aksiologi (ilmu tentang nilai). Filsafat Aksiologi merupakan cabang filsafat yang muncul pertama kali pada paruh kedua abad IX.<sup>1</sup> Menurut Riseri Frondizi, nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda.<sup>2</sup> Menurut Langeveld, dalam bahasa sehari-hari, kata “barang sesuatu mempunyai nilai, maka “barang sesuatu” yang dimaksudkan di sini dapat disebut barang nilai. Dengan demikian, mempunyai nilai itu adalah soal penghargaan, maka nilai adalah dihargai.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, Juhaya S.Praja dengan singkat mengatakan, nilai artinya harga. Sesuatu mempunyai nilai bagi seseorang karena ia berharga bagi dirinya. Pada umumnya orang mengatakan bahwa nilai sesuatu benda melekat dan bukan di luar benda. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa nilai ada di luar benda.<sup>4</sup>

Nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (yakni manusia yang meyakini). Sedangkan pengertian nilai menurut J.R. Fraenkel sebagaimana dikutip Chabib Toha<sup>5</sup> adalah *a value is an idea a concept about what some one thinks is important in life* (nilai adalah suatu ide, suatu konsep tentang sesuatu yang penting

---

<sup>1</sup> Riseri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Jakarta; PT.Pembangunan, tth, h. 196. Lihat juga Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 26

<sup>4</sup> Juhaya S.Praja, *Aliran – Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 59.

<sup>5</sup> Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 60



dalam hidup bagi orang yang berpikir). Pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan antara subjek dengan objek memiliki arti penting dalam kehidupan objek. Sebagai contoh segenggam garam lebih berarti bagi masyarakat Dayak di pedalaman dari pada segenggam emas. Sebab garam lebih berarti untuk mempertahankan kehidupan atau mati, sedangkan emas semata-mata untuk perhiasan.

Sidi Gazalba sebagaimana dikutip Chabib Toha, mengartikan nilai sebagai berikut:

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.<sup>6</sup>

Pengertian tersebut menunjukkan adanya hubungan antar subjek penilaian dengan objek, sehingga adanya perbedaan nilai antara garam dengan emas. Tuhan itu tidak bernilai bila tidak ada subjek yang memberi nilai, Tuhan menjadi berarti setelah ada makhluk yang membutuhkan. Ketika Tuhan sendirian, maka ia hanya berarti bagi diri-Nya sendiri. Garam menjadi berarti seolah ada manusia yang membutuhkan rasa asin. Emas menjadi berarti setelah ada manusia yang mencari perhiasan.

Namun demikian nilai-nilai semata-mata terletak kepada subjek pemberi nilai, tetapi di dalam sesuatu tersebut mengandung hal yang bersifat esensial yang menjadikan sesuatu itu bernilai. Tuhan mengandung semata sifat kesempurnaan yang tiada taranya dari segenap makhluk apapun di jagat raya ini; garam mengandung zat asin yang dibutuhkan manusia; dan emas mengandung sesuatu yang tidak akan berkarat. Apabila unsur yang bersifat esensial ini tidak ada, maka manusia juga tidak akan memberikan harga terhadap sesuatu tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 61.

Menurut Louis O. Kattsof nilai diartikan sebagai berikut:

1. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolok ukur yang pasti yang terletak pada esensi objek itu.
2. Nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran dapat memperoleh nilai jika suatu ketika berhubungan dengan subjek-subjek yang memiliki kepentingan. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian antara garam dan emas tersebut di atas.
3. Sesuai dengan pendapat Dewey, nilai adalah sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan.
4. Nilai sebagai esensi nilai adalah hasil ciptaan yang tahu, nilai sudah ada sejak semula, terdapat dalam setiap kenyataan namun tidak bereksistensi, nilai itu bersifat objektif dan tetap.<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut, menurut Chabib Toha, nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap dan pemaknaan manusia sendiri.

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga. Nilai material, nilai spiritual, nilai vital.

1. Nilai Material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan.
2. Nilai Spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran).

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan

---

<sup>7</sup> Louis Kattsof, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986, h. 333.

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.<sup>8</sup>

Kata “Islam”, biasanya diterjemahkan dengan “penyerahan diri”, penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan.<sup>9</sup> Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *The Religion of Islam* menegaskan: “*Islam has a two-fold significance: a simple profession of faith — a declaration that “There is no god but Allah and Muhammad is His Messenger” (Kalimah) and a complete submission to the Divine will which is only attainable through spiritual perfection*”. (Islam mengandung dua macam arti, yakni (1) mengucapkan kalimah Syahadat, yakni “Tak Ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya”; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang ini hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan rohani).<sup>10</sup>

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.<sup>11</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 2

<sup>9</sup> Mohammad Arkound, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996, h. 17.

<sup>10</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990, h. 4.

<sup>11</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 14.

menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.<sup>12</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Menurut Kursyid Ahmad sebagaimana dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dkk, bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>13</sup>

Menurut M.M. Metwally sebagaimana dikutip oleh Heri Sudarsono, bahwa ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas.<sup>14</sup> Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.<sup>15</sup> Menurut Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*<sup>16</sup> “Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

---

<sup>12</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006, h. 6

<sup>13</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan ...*, h. 17.

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV Adipura, 2004, h. 13.

<sup>15</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 28.

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah, 1980, h. 3.

Menurut M. Umer Chapra *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*. “Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan”.<sup>17</sup>

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman, alasannya karena dalam definisi tersebut secara tegas terdapat istilah ”ketidakadilan”, ”perolehan” dan ”pembagian” di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Definisi Hasanuzzaman, ekonomi Islam yaitu :

”Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat (*Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society*).<sup>18</sup>

Hal penting dari definisi tersebut adalah adanya prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan yaitu syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya

---

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan ...*, h. 16.

<sup>18</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi ...*, h. 8

suatu kegiatan. Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggungjawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan

manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Lalu apa yang disebut sistem ekonomi Islam? Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).<sup>20</sup>

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ  
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
(المائدة: ٣)

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah: 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 8-10

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan ...*, h. 11.



kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).<sup>22</sup>

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>22</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 5-6.

sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.<sup>23</sup>

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 10

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 11

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam..

## **B. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunah Nabawiyah.<sup>25</sup>

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis & komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*). Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu:<sup>26</sup>

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta & pemilik. Firman Allah dalam QS. an-Najm: 31:

---

<sup>25</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi ...*, h. 3.

<sup>26</sup> *Ibid*

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (النجم: ٣١)

Artinya: "Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)" (QS. an-Najm: 31).

2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
3. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT. Selain dari asas filsafat tersebut di atas, ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu:

1. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam:

- a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi sedap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
- b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad & Abu Daud yang mengatakan: "Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu air (termasuk garam), rumput, dan api". Sumber alam ini dapat dikiasikan

(sekarang) dengan minyak dan gas bumi, barang tambang dan kebutuhan pokok manusia lainnya.

## 2. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Furqan: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  
(الفرقان: ٦٧)

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian" (QS. al-Furqan: 67).

Selain itu. Firman Allah dalam QS. ar-Rahman: 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن: ٩)

Artinya: "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

## 3. Keadilan

Keadilan di dalam Al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak, dan hibah.

Selain dari ketiga nilai tersebut diatas, Islam memiliki nilai instrumental yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim dan masyarakat pada umumnya. Adapun nilai instrumental tersebut adalah Zakat, Larangan Riba, Kerja

sama Ekonomi, dan Jaminan Sosial. Jika nilai instrumental ini dilaksanakan, maka akan terwujud sistem ekonomi yang seimbang, menguntungkan, dan menyejahterakan semua pihak.<sup>27</sup>

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*.<sup>28</sup> Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa).<sup>29</sup> Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).<sup>30</sup>

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara.

Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

(1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>28</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 37-38

<sup>29</sup> Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990, h. 15

<sup>30</sup> Muslim H.Kara, *Bank ...*, h. 38

<sup>31</sup> *Ibid*

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil).<sup>32</sup>

Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin,<sup>33</sup> prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian..." (QS 4:29).<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 17

<sup>33</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003, h. 13.

<sup>34</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h. 122.



- (4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian...", (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh *monopoli* dan *oligopoli*, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- (6) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (البقرة: ٢٨١)

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang

telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).(QS 2:281).<sup>35</sup>

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

- (7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*idle assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*net earning from transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi
- (8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga.<sup>36</sup> Dalam Perjanjian Lama, larangan riba

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h 70.

<sup>36</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 2-3.

tercantum dalam Leviticus 25:27, Deutronomi 23:19, Exodus 25:25 dan dalam Perjanjian Baru dapat dijumpai dalam Lukas 6:35.

Dari banyak ayat al-Qur'an dan hadist nabi yang sebagian telah disebutkan di muka dapat ditarik beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjuk-Nya.
2. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaan-Nya.
3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
4. Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif).
5. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
6. Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya.
7. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.
8. Harta jangan hanya beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam shadaqah.
9. Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan dikembangkan secara sah.

10. Harta jangan dihabur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara'.
11. Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, jangan kurang tetapi secukupnya.
12. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan.
13. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.
14. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.
15. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial.<sup>37</sup>

### C. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri ekonomi Islam:

1. Pemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk

---

<sup>37</sup> Achmad Ramzy Tadjoeidin, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Waca, 1992, h. 13-14.

merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah SWT.

Pemilikan ini, meskipun relatif, membawa kewajiban yang harus dipenuhi manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan tertentu. Pemilikan ini, meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada instustusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapapun juga.

2. Atau dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "*cost of money*" ia memperhitungkan bunga.

Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di pasar. Ini tidak diridhoi Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan baru bagi kalangan masyarakat.

3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dan sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan

perusahaannya. "*Small Business Service*" ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% dari keuntungannya guna menolong mereka.

4. Thaharah atau sesuci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya ini sembarangan, maka timbullah kerusakan lingkungan. Contoh kecil adalah kencing di bawah pohon atau di dalam lubang yang dilarang dalam Islam.
5. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal.
6. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.
7. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya

berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.<sup>38</sup>

8. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
9. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Ia bekerja baik disertai rasa bersyukur atas perolehannya serta mencari ridhio illahi.
10. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
11. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah memberi ampunan. Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di lautan untuk membuat kejahatan dan kerusakan di mana-mana. Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi ...*, h. 4.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 6.

#### D. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional

Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut yaitu:

##### 1. Sumber (*Epistemology*)

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan di dalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan.

Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia. Penjelasan Allah SWT. tentang kejadian-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS. Yasin ayat 34-35, 72-73) (QS. an-Nahl ayat 5-8, 14, 80) menunjukkan bahwa alam ini disediakan begitu untuk dibangun oleh manusia sebagai Khalifah Allah (QS. al-Baqarah ayat 30).<sup>40</sup>

Larangan-larangan Allah SWT. seperti riba (QS. al-Baqarah ayat 275) perjudian, babi, judi, arak, dan lain-lain karena perkara-perkara tersebut mencero bohi fungsi manusia sebagai khalifah tadi. Oleh karena itu, sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap. Kesemuanya itu menjurus kepada suatu tujuan yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan

---

<sup>40</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan ...*, h. 8.



waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Kalau ada ketikanya diambil dari wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia sendiri karena tujuannya mendapat pengiktirafan manusia bukan mengambil pengiktirafan Allah SWT. Itu bedanya antara sumber wahyu dengan sumber akal manusia atau juga dikenal sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.

Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja.

## 2. Tujuan Kehidupan

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia.<sup>41</sup> Firman Allah SWT. dalam QS. an-Nahl ayat 12-13:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya), (QS. an-Nahl: 12).

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 9.

### **BAB III**

#### **A. M. SAEFUDDIN TENTANG NILAI-NILAI DASAR SISTEM EKONOMI ISLAM**

##### **A. Biografi A. M. Saefuddin, dan Pendapat-pendapatnya tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam**

###### **1. Biografi A. M. Saefuddin**

A.M. Saefuddin, lahir di desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940.<sup>1</sup> Setelah melalui pendidikan Madrasah Diniyah dan pendidikan umum, ia memperoleh kesarjanaan Sosial Ekonomi IPB tahun 1966 dan Doktor Ekonomi Pertanian Universitas Justus Liebig, Jerman Barat, tahun 1973. Sejak mudanya ia aktif dalam kepengurusan PII dan HMI serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Ia mendirikan dan membina berbagai lembaga swadaya masyarakat antara lain Lembaga Studi Agama & Filsafat, Pusat Pengembangan Agribisnis, Lembaga Pengembangan Usaha Kecil, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, Yayasan Rahmi, Yayasan Muslimin Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Islam, dan lain-lain. Dalam bidang profesi, ia pernah menjadi Ketua Departemen Sosial Ekonomi IPB, Staf Ahli Biro Pemasaran & Koperasi Bappenas, Penasihat Kantor Pusat Bank Indonesia dalam Proyek-proyek Pengembangan Pengusaha Kecil bekerja sama dengan Bank Dunia. Sebagai dosen ia aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat. Pernah menjabat Rektor Universitas

---

<sup>1</sup>Dawam Rahardjo, et. al. (Penyunting), *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1989, hlm. 265.

Ibn Khaldun Bogor. Jabatannya kemudian sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Ibn Khaldun Bogor, Associate Professor pada Fakultas Pasca Sarjana IPB dan Anggota TNPP Departemen Koperasi. Ia menekuni juga pengabdian sebagai muballigh. Sangat gemar menghadiri dan menyampaikan makalah pada pertemuan-pertemuan antara lain *The Second World Conference on Religion and Peace di Gent Belgia*, *The First International Conference on Islamic Economics di Makkah Saudi Arabia*, *Seminar Koperasi Pertanian di Praha Cekoslowakia*. Mengikuti Workshops dan Seminar tentang *Reintegration and Rural Development* dan tentang *University and The Third World* di Jerman Barat, *University Didactics di Kassel*, tentang *Ekonomi Pertanian* di Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina. Juga forum-forum ke-Islaman di masjid Kampus, di desa, di kota dan di luar negeri.<sup>2</sup>

Kesibukannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni sebagai dosen, pendiri Pesantren Ulul Albab, Pesantren Tarbiyatun-Nisa, Pesantren Huffazh Anak-anak Nurul Qur'an, dan Pesantren Ummul Quro. Ia aktif dalam politik praktis, berwawasan luas dan kritis. Ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI periode 1992-97 dari Fraksi Persatuan Pembangunan; menjadi anggota Komisi X DPR-RI yang membidangi masalah-masalah RISTEK/BPPT/BPIS, BAPPENAS, Lingkungan Hidup, BATAN, LIPI, BPS, BAKOSURTANAL, LAPAN, dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 1995-1999.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>AM. Saifuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, 1990, hlm. 5.

<sup>3</sup>AM. Saifuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 189.

## 2. Karya-Karyanya

Pemikirannya di bidang sosial-ekonomi-politik dimuat dalam media cetak. Buku-bukunya yang diterbitkan antara lain; *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim; Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam; Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam; Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi; Ekonomi dan Masyarakat; Pemasaran Hasil Perikanan; Pemikiran Ekonomi Islam (penerjemah); Antologi Sosial Ekonomi; Islam Disiplin Ilmu (IDI) Ekonomi, Islam Disiplin Ilmu Pertanian, IDI-Sosiologi, IDI-Antropologi, IDI-Manajemen; dan Ada Hari Esok untuk Indonesia Emas, Fenomena Kemasyarakatan*.<sup>4</sup>

- a. Buku yang berjudul: *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Pada intinya dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk hidup di dunia ini memang tidak mudah. Karena pertentangan berkelanjutan antara yang lurus dan bengkok atau berliku-liku berjalan seiring dengan usia kita, maka kita merasa sulit untuk menjadi manusia. Menurut A.M. Saefuddin bahwa dalam diri manusia selalu mengandung konflik ketika berupaya mencari jati diri. Mencari pribadi atau kepribadian yang utuh, memang merupakan masalah kita sepanjang sejarah. Kekecewaan dan kepuasan silih berganti sebagaimana *wakhtilafillaili wannahari* atau pergantian malam dan siang. Inilah kemudian yang memunculkan tingkah polah atau perilaku kita dengan segala atributnya, sejak yang positif, negatif hingga yang campur aduk alias gado-gado. Yang positif itu jelas baik dan kuat, yang menumbuhkan potensi konstruktif. Sedangkan yang negatif adalah kelemahan kita, menjurus ke potensi destruktif. Sesekali konstruktif, tetapi seringkali destruktif. Menurut A.M. Saefuddin kelemahan ini merupakan kekalahan dalam percaturan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 189.

konflik diri, yang penyebabnya antara lain: Pertama, lemahnya pengetahuan kita tentang manusia, alam dan Tuhan. tentang hidup dan kehidupan. Tentang nilai-nilai agama yang kita yakini, Islam. Kedua, kurangnya kemampuan untuk tanggap dan melakukan antisipasi masalah-masalah kontemporer yang muncul di sekeliling kita. Dua hal ini terdapat di dalam diri yang kemudian membentuk asumsi dan persepsi. Dan boleh jadi, lalu menghasilkan cara berpikir dan bersikap, sejak yang tradisional hingga modern, sejak yang realistik hingga yang idealistik.

Dalam hal ini, kita selalu mengajak dan mengingatkan diri kita, bahwa ketika wajah memandang langit seharusnya tidak boleh lupa atau lalai bahwa kaki berpijak di bumi. *Pedes in terra, ad sideravisus*. Antara pergaulan yang vertikalistik dengan pergumulan yang horisontalistik. Antara *hablumminallah*, *hablumminannas* dan *hablumminal alam*. Antara rumah adat dengan rumah bergaya Spanyol. Berpeci atau berjambul. Sarung, baju kampret, peci dan jubah serta sorban dengan pantalon dan jas atau safari dan batik. Sampai di sini muncullah konflik dalam sensitivitas untuk menentukan pilihan yang terbaik yakni yang tepat nilai dan tepat lingkungan. Tepat 'langit' tapi juga tepat 'bumi'. Sebagaimana Firman Allah SWT, *wabtaghi fima atakallahuddaral akhirah, wala tansa nasibaka minaddunya*. Untuk itu, jelas, kita memerlukan penalaran dan perenungan yang mendalam. Agar ditemukan inovasi dan rekayasa kehidupan yang mempribadi secara seimbang.

Di dalam konflik yang berkepanjangan antara perbuatan yang haq dan yang bathil, kita akan menemukan keseimbangan. Dari *inequilibrium* ke

*equilibrium*. Demikianlah seterusnya, sampai kita hinggap pada istiqomah, yakni titik keseimbangan.

Dan pada titik inilah kita memiliki pribadi yang mempesona, yang mampu memperdekat jarak antara langit dan bumi. Mendekatkan jarak antara kata dan perbuatan. Antara hati, ucapan dan tingkah laku. Ketiganya, yakni hati, ucapan dan perbuatan terletak pada garis linier atau garis lurus. Dan itulah yang dimaksud antara lain dengan *shirathal mustaqim*, yakni jalan terpendek, linier, antara kita dengan Allah SWT.

- b. Buku yang berjudul: *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Dalam buku ini diungkapkan bahwa pada awalnya ekonomi dan agama itu menyatu, tidak terpisah. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat pun ekonomi berkait dengan agama, ahli ekonomi Eropa adalah pendeta dan ahli agama. Pada zaman pertengahan Eropa, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti Thomas Aquinas, Augustine dan lain-lain. Bahkan Fisiokrat pada permulaan tahun 1700-an telah berpikir tentang tanah dan orang berdasar kekristenan. Tapi dengan adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi mereka mulai memisahkan kajian ekonominya dari keterandalan agamanya. Kita mengenal keadaan seperti ini sebagai gejala awal revolusi menentang kekuasaan gereja, dan merupakan awal dari kajian ekonomi yang menjauhkan diri dari pikiran ekonomi skolastik.

Sejak itu sejarah berjalan terus sampai pada keadaan di mana revolusi kajian ekonomi yang menentang agama mulai mendingin. Para ekonomi kontemporer mulai mencari-cari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religious, bermoral dan human. Ekonom Gunnar Myrdal dalam bukunya "*Asian*

*Drama*", menyusun kembali ilmu ekonomi yang berkait dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Munculnya penampilan wajah kajian ekonomi baru dengan pendekatan humanistik dari Eugene Lovell dalam bukunya yang terkenal: "*Humanomics*."

Hadirnya pikiran baru dari E.F. Schumacher dalam terbitannya: "*Small is Beautiful, Economics as if People Mattered*". Para ekonom ini telah menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan kajian ekonomi dengan nilai-nilai moral - humanis adalah suatu kekeliruan yang besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta. Kesadaran ini tumbuh setelah semua bangsa menyaksikan sendiri hasil dari modal pembangunan sosio-ekonomi yang berazaskan model liberal-kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model marxist dan neomarxist, yang keduanya ini mengutamakan kehidupan materialistic hedonisme. Hasil ini misalnya: kemiskinan di tengah kemakmuran, konsumerisme, budaya permissive, dan rupa-rupa bentuk pop-hedonism, gaya hidup yang sekuler dan sinkretis dan lainnya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai agama. Tiap aliran pemikiran dan tiap agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana penampilannya yang tercermin pada tingkah laku atonomi manusia pengikutnya.

Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini nampaknya akan mengarah kepada tidak hanya bertolak dari azas kapitalisme, dan azas marxisme, tetapi ada azas lain yang lebih azali. Mungkinkah azas yang azali dari ilmu ekonomi ini kita temukan dari sumber lain dan lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh manusia dan alam semesta? Yaitu asas

ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logik), kebaikan (etik) dan keindahan (estetik)? Asas yang dapat membebaskan manusia dari kegelisahan karena ketidakpastian? Yang sanggup mengangkat manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan? Yang dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi: ketidakadilan, kerakusan dan ketimpangan? Dan yang sanggup berlaku universal, sepanjang zaman, dan di semua tempat, serta bagi semua bangsa? Asas ekonomi yang secara historis empirik telah terbukti keunggulannya di muka bumi ini? Dan yang tidak bebas atau tidak dapat membebaskan diri dari pengadilan nilai? Yaitu nilai yang bersumber dari Pencipta Alam Semesta, dan bukan nilai yang dibuat manusia?

- c. Buku yang berjudul: *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Buku ini mengupas masalah riba di dalamnya dijelaskan bahwa Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 s/d 280 telah membeberkan secara jelas dan tegas tentang hukum riba dan bagaimana gambaran pelaku-pelaku riba. di dunia ini, serta siksaan yang akan mereka peroleh pada hari kiamat nanti.

Ayat-ayat sebelum ayat riba, telah dijelaskan oleh Allah SWT. hukum sedekah, dan bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang selalu bersedekah, menginfakkan harta bendanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Wajah yang selalu senyum, hati yang ikhlas, jiwa yang suci penuh kasih sayang, adalah ciri khas orang-orang yang selalu bersedekah yang diungkapkan dalam ayat-ayat tersebut.

Sebaliknya sebagai lawan dari sedekah, ayat-ayat berikutnya dibeberkan secara langsung tentang praktek riba, dan pelaku-pelakunya



dengan wajah yang sangat buruk hati yang gersang, yang menimbulkan kejahatan di dalam masyarakat, kerusakan di muka bumi dan kebinasaan terhadap hamba-hamba Allah.

Sedekah adalah suatu pemberian yang bertujuan kebaikan dan kesucian, didasarkan atas rasa *takaful* penuh kebersamaan dan *ta'awun* saling tolong-menolong. Sedangkan riba adalah kebakhilan dan kekotoran, yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain. Sedekah adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan riba adalah pengembalian utang disertai dengan tambahan yang haram, yang diambil dari hasil jerih lelah dan darah daging orang yang berpiutang. Dari jerih lelahnya, karena uang tambahan yang diterima berasal dari keuntungan hasil usaha dan jerih lelahnya sendiri. Dan dari darah dagingnya apabila ia tidak memperoleh keuntungan tetapi merugi, atau mungkin saja pinjaman itu ia gunakan untuk nafkah hidup dirinya dan anak istrinya sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan sedikit pun.

Tidak ada perkara yang paling buruk dan paling jelek di antara perkara Jahiliyah yang telah diberantas oleh Islam melainkan perkara riba. Dan tidak ada ancaman yang paling keras yang terkandung dalam berbagai ayat al-Qur'an, baik dari segi lafadz atau makna, yang tersurat maupun yang tersirat, melainkan ancaman terhadap praktek riba.

- d. Buku yang berjudul: *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Islam merupakan risalah atau ajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Islam merupakan petunjuk sempurna bagi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan di bumi dan mengatur hubungan serta

tanggung jawab secara vertikal kepada Allah dan secara horisontal kepada dirinya, masyarakat, serta alam semesta. Di dalamnya terdapat sistem nilai bagi manusia untuk memecahkan beragam masalah kehidupan yang dihadapi.

Sistem nilai Islam merupakan perangkat keyakinan dan identitas yang mewarnai motivasi dan pola pemikiran, perasaan, keterikatan, perilaku dan tujuan hidupnya. Sedangkan norma merupakan penjabaran nilai dalam bentuk peraturan atau petunjuk pelaksanaannya.

Bagi Muslim tersedia sumber nilai dan norma ilahiah, yaitu Quran dan Sunnah, serta nilai duniawiah, yaitu pikiran dan kenyataan alam. Sumber nilai duniawiah atau mondial digunakan sepanjang tidak menyimpang dari sistem nilai ilahiah.

Pengaruh sistem nilai dan norma Islam terhadap perilaku manusia dapat secara integral (*kaffah*) atau parsial bergantung. pada beberapa faktor: keyakinan total terhadap sistem nilai dan norma, daya scrap untuk menggunakan sistem nilai tersebut, pengaruh interdependensi dengan sistem nilai dan norma lainnya, kondisi fisiologik, psikologik dan fisik, dan kendala lainnya yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian dapat dijumpai perilaku yang beragam dari Muslim dalam menempatkan posisi dirinya terhadap alam semesta, masyarakat dan Allah. Akibatnya ialah adanya perbedaan persepsi manusia terhadap risalah Islam, dan akhirnya terjadi keragaman perilaku.

## B. Pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

### 1. Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam

Menurut A.M. Saefuddin, nilai-nilai dasar sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid dalam Islam ialah sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### a. Nilai Dasar Pemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah:

- 1) Pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti berlaku terhadap pemilikan lahan atau tanah. Hadis Nabi Muhammad SAW:

وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال  
من أحيأ أرضاً مَيِّتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذی وقال: روي مر  
سلا وهو كما قال. واختلف في صحايه فقیل: جابروقیل: عائشة وقیل:  
عبدالله بن عمر والراجح الأول<sup>٦</sup>

"Dari Said bin Zaid ra dari Nabi SAW beliau bersabda: barang siapa menghidupkan tanah mati, ia menjadi miliknya. Riwayat tiga Imam, dan hadits Hasan menurut Tirmidzi. Dan ia berkata: sebagian riwayat hadits tersebut murshal, dan memang demikian. Sahabat yang meriwayatkan masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Jabir, ada yang mengatakan Aisyah dan ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, dan yang terkuat adalah yang pertama".

<sup>5</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Samudera, 1984, h. 20.

<sup>6</sup> Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillah al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, tth, hlm.189

- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.<sup>7</sup>
- 3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Hadits Nabi Muhammad saw: "Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput dan api, dan garam" (perawi Ahmad dan Abu Daud). Empat macam barang ini dikiaskan juga kepada barang tambang dan minyak bumi, serta kebutuhan pokok kehidupan manusia pada waktu dan kondisi tertentu.

Ke dalam kategori milik umum ini termasuk sumber-sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa.<sup>8</sup>

#### **b. Nilai Dasar Keseimbangan**

Menurut A.M. Saefuddin, nilai dasar keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan

---

<sup>7</sup>Q.2: 180 "Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu telah hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapak dan karib kirabat secara ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang takwa". Lihat juga Q.4: 11-12, 176, tentang detail distribusi waris.

<sup>8</sup>"Mereka bertanya kepadamu perihal anfal. Katakanlah bahwa anfal adalah untuk Allah dan Nabi" (Q.8:1). Anfal berarti barang-barang bebas, yang dapat diperoleh tanpa mengusahakannya, atau tambahan yang diperoleh melebihi yang dihaki. Anfal termasuk juga harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Semua yang dimiliki Allah dan Nabi adalah milik umum. "Segala sesuatu yang dikembalikan Allah kepada Nabi-Nya dari penduduk kota adalah untuk Tuhan, Nabi, sanak famili, anak yatim, orang miskin dan musafir, sehingga semua itu tidak hanya diperoleh secara bergantian oleh orang kaya di antara kamu" (Q.59: 6-9).

umum yang harus dipelihara, "*growth with equity*" tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi konsumerisme.<sup>10</sup>

Berbagai cobaan atau ujian di dunia ini seperti kelaparan, kemiskinan atau "*poverty in the midst of plenty*", kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain akan mengakibatkan keseimbangan terganggu, kestabilan ekonomi dan keamanan pun tidak terjamin.<sup>11</sup> Dalam keadaan demikian salah satu tindakan telah dicontohkan dan diniatkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab: "Bila aku mempunyai waktu lebih banyak pada masa mendatang, aku akan mengadakan redistribusi kekayaan dengan mengambil kelebihan dari si kaya dan memberikannya kepada si miskin". Kemungkinan tindakan lain, misal nasionalisasi industri atau kegiatan ekonomi lainnya dapat merupakan implikasi nilai dasar keseimbangan.

### c. Nilai Dasar Keadilan

Menurut A.M. Saefuddin, kata yang terbanyak disebut dalam Al Qur'an setelah "Allah", dan "ilmu pengetahuan", ialah "keadilan". Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang

---

<sup>9</sup>Q.2: 201 sering dipakai relevansinya dengan nilai keseimbangan ini. Lihat juga Q.25: 67.

<sup>10</sup>Q.7: 31 "Hai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika tiap shalat. Makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang berlebih-lebihan atau melampaui batas". Menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja tetapi juga pembelanjaan dan sadakah yang berlebihan (lihat Q.17: 29, 55: 8-9). Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu dan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat maka haruslah ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan semula. Q.2: 143 "Begitulah Kami jadikan kamu umat yang pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan Rasul menjadi saksi pula atas perbuatanmu. Lebih detail lihat dalam Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 66.

<sup>11</sup>Q.2: 155 "Demi, sesungguhnya akan Kami uji kamu dengan suatu cobaan yaitu ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, manusia dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar (atas percobaan itu)".

sangat dimuliakan dalam Islam, baik yang berkait dengan aspek sosial politik maupun sosial ekonomi.<sup>12</sup>

- 1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam.<sup>13</sup>
- 2) Keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen, efisiensi dan memberantas keborosan.<sup>14</sup>

Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat infak, sadakah.<sup>15</sup>

Hadis Nabi Muhammad saw: "Saya bersumpah kepada Allah; bukanlah orang beriman, bukanlah orang beriman, bukanlah orang beriman yang sepanjang hari makan kenyang sedang mereka mengetahui tetangganya dalam kelaparan".

Keterangan ayat-ayat menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia meski diketahui nyata bahwa terdapat perbedaan manusia dalam kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai ...*, h. 24.

<sup>13</sup> "Adapun orang yang kikir (tidak mau mengorbankan sedikitpun dari haknya) dan mereka merasa cukup sendiri (egoistis) serta mendustakan (mencemoohkan) kebaikan, maka ia Kami licinkan jalan ke arah kesukaran (kekacauan) - Q.92: 8-10. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidak-serasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah (lihat Q.57: 20) dan mempertajam pertentangan antara si kuat dan kaya dengan si lemah dan miskin, dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial (Q.104:1-3).

<sup>14</sup> Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkan merampas hak orang lain (Q.4: 160-161, 26: 182-183, 2: 188). Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya (Q.15:19,20:6,25:2,87:1-3).

<sup>15</sup> Lihat Q.2:110, 271, 280, 4:8, 9:60, 24:33 27:26-27, 47:38, 57:7, 60:8, 70:24-25.

<sup>16</sup> Lihat Q. 30:37. Lihat juga Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi ...*, h. 68.

Karakter pokok dari nilai keadilan di atas menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan ada dalam kemakmuran menurut syariah Islamiyah. Penyimpangan dari keadaan tersebut akan berakibat masyarakat divonis oleh ayat Allah.<sup>17</sup>

Ketiga nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam di atas yaitu kebebasan terbatas terhadap pemilikan harta kekayaan dan sumber nilai keseimbangan, dan nilai keadilan merupakan kebulatan nilai yang tidak dapat dipisahkan. Nilai dasar ini merupakan pangkal bertolak untuk mengungkap nilai-nilai instrumental sistem ekonomi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **2. Nilai-nilai Instrumental Sistem Ekonomi Islam**

Menurut A.M. Saefuddin, bangsa Indonesia telah melakukan instrumentasi bertingkat, dari filsafat sistem ke perangkat nilai-nilai dasar sistem, dan dari nilai dasar ke nilai-nilai instrumental. Implementasi sistem ekonomi bergantung kepada kerangka kerja yang diturunkan dari perangkat nilai instrumental yang menjamin fungsionalisasi sistem.

Tiap sistem ekonomi menurut aliran pemikiran dan agama tertentu memiliki perangkat nilai instrumental sendiri yang berlainan. Dalam sistem kapitalisme<sup>18</sup> nilai instrumental terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, informasi dan bentuk pasar

---

<sup>17</sup>Q.17:16 "Apabila Kami menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, Kami memberi kesempatan kepada orang-orang yang mewah di negeri itu untuk memerintah, kemudian mereka membuat kecurangan-kecurangan di negeri itu, maka benar-benar terjadilah keputusan kata (vonis) atas negeri itu, lalu Kami hancur luluhkannya". Q.27:5 "Dan Kami menghendaki untuk memberi pertolongan kepada kaum tertindas di bumi, untuk Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, dan Kami jadikan pula mereka itu pewaris-pewaris".

<sup>18</sup> Membahas mengenai sistem ekonomi kapitalis adalah sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek baik politik, kebudayaan, sosial dan perkembangan IPTEK. Sistem kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kehidupan dan pandangan hidup masyarakat barat di mana sistem ini lahir dan berkembang. Pandangan hidup masyarakat barat pada umumnya adalah rasionalistik, materialistik individualistik dan liberalistik. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi juga berkaitan erat dengan pandangan hidup rasionalisme, materialisme, individualisme dan liberalisme. Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 68.

atomistik dari tiap unit ekonomi, pasar yang monopolistik untuk mencegah perang harga dan pada waktu yang sama menjamin produsen dengan kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pada biaya marginal. Sedangkan dalam sistem marxisme, semua perencanaan ekonomi dilaksanakan secara sentral melalui proses interaksi yang mekanistik, pemilikan kaum proletar terhadap faktor-faktor produksi diatur secara kolektif; proses interaksi dan kolektifisme ini adalah beberapa nilai instrumental yang pokok dari sistem marxisme.<sup>19</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam dapat kita ungkap dua nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### **a. Zakat**

Menurut A.M. Saefuddin, zakat adalah kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Zakat bukanlah pajak yang untuk menjamin penerimaan negara. Distribusi hasil pengumpulan zakat tertentu yaitu kepada delapan kelompok sasaran.

Q.9:60 "Hanya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, orang muallaf hatinya, untuk memerdekakan budak (hamba), orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang

---

<sup>19</sup> Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 8.

<sup>20</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai ...*, h. 26.



musafir sebagai suatu keperluan pada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana".

Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Pengaruh-pengaruh baik dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang "*growth with equity*"; peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hadis Nabi saw; "Perdagangkanlah harta anak yatim itu, sehingga tidak habis termakan zakat". Kata zakat dalam Al Qur'an selalu dirangkaikan dengan shalat dan disebut sebanyak 82 kali, menunjukkan betapa lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis. Istilah lain dari zakat disebutkan dalam Al Qur'an sebagai sadakah (Q.9:103), haq (Q.6:141), *an-nafaqah* (Q.9:34).

Zakat merupakan lembaga Islam dan telah diwajibkan Allah sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi-Nabi sesudahnya sampai Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad saw. (Lihat 0.21:73,5:12, 19:55, 19:31, dan 9:60). Mengingat kedudukan zakat sebagai rukun Islam ketiga dan memiliki dampak sosial ekonomi yang baik, sampai-sampai Khalifah Abubakar Sidik berani mengambil resiko akan memerangi orang Islam yang tidak membayar zakat walaupun melakukan shalat.

Peranan lembaga zakat, baik zakat harta (mal) maupun zakat fitrah (*nafs*), akan sangat nampak lagi dengan lebih baik bila diberlakukan bersama-sama dengan pelarangan riba sebagai nilai instrumental berikutnya.<sup>21</sup>

### **b. Pelarangan Riba**

Menurut A.M. Saefuddin, hakikat pelarangan riba dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba. Sesungguhnya Islam itu adalah suatu sistem ekonomi yang bersendikan larangan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila; keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba; maka orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah; orang yang mengulangi (mengambil riba), maka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah: 275).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 27.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة: ٢٧٦)

Artinya: Allah menghapuskan (berkat) riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyukai (mengasihi) tiap orang dalam kekafirannya lalu berbuat dosa. (QS. al-Baqarah: 276).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٧٧)

Artinya; Sesungguhnya orang beriman dan mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, untuk mereka itu pahala di sisi Tuhannya, dan tak ada ketakutan atas mereka dan tiada mereka berduka cita. (QS. al-Baqarah: 277).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) itu, jika kamu orang beriman". (QS. al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {٢٧٩} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩-٢٨٠)

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (tidak meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu berbuat tobat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu (modalmu), kamu tidak menganiaya (dengan mengambil lebih), dan tidak (pula) dianiaya (dengan penghapusan pokok hartamu). Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan kamu memenyedekahkan(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 279-280)

Tentang larangan riba, terdapat dalam (QS. ali-Imran: 130, 30:39).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. ali-Imran: 130).

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٩)

Artinya: Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan . (QS. ar-Rum: 39).

Hadits Nabi Muhammad SAW: "Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka memakan riba. Ada orang bertanya: Sekalian manusiakah wahai Rasulullah? Jawab beliau: Barangsiapa tidak memakannya, terkena debunya".

Ulama Islam telah bulat sepakat tentang larangan riba menurut al-Qur'an, yaitu riba *nasi'ah*, riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa yang tertentu, panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Riba yang dijalankan oleh Bank atau lembaga keuangan non-Bank dan orang-orang dalam transaksi perdagangan mereka yang non-Islami, semuanya haram tanpa keraguan.

Menurut A.M. Saefuddin, Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, Bank atau non-Bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan, baik ia rugi atau untung. Islam melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi

utang-piutang yaitu yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu terhadap kalau dibayar tunai.

Larangan riba ternyata tidak hanya dalam Islam saja. Dalam Taurat dan Injil pun tercantum larangan riba, meskipun mereka sengaja telah mengubahnya atau melupakannya. Agama Kristen yang sekarang telah melarang riba secara positif tidak saja bagi orang Kristen tetapi juga untuk yang bukan Kristen; bahkan pembaharu Kristen yaitu Martin Luther tidak merasa cukup dengan larangan bunga yang sedikit atau banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus kepada pembungaan uang sampai kepada menjual dengan harga bayar kemudian yang lebih mahal dari harga tunai.

Taurat yang telah diubah aslinya oleh Yahudi, yaitu dalam Kitab Ulangan Pasal 23 ayat 19-20 tercantum: "Maka tak boleh kamu mengambil bunga daripada saudaramu (Orang Israel), baik bunga uang, bunga makanan atau bunga barang. Maka daripada lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi dari saudaramu tak boleh, supaya diberkati Tuhanmu akan kamu dalam segala perkara pegangan tanganmu dalam negeri, yang kamu tuju sekarang hendak mengambil dia akan bagianmu pusaka".

Solon pembuat undang-undang Athene zaman dulu telah melarang riba; juga Plato dalam bukunya *"The Canon"* berkata: "Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk meminjamkan uang dengan bunga"; dan Aristoteles dalam bukunya *"The Politics"* berkata yang sama pula: "Adalah wajib bagi kita untuk menolak pembungaan uang (riba), karena ia adalah satu jalan keuntungan' yang lahir dari uang itu sendiri, jalan mana menghalanginya dari menunaikan fungsinya, karena uang itu tidak seyogyanya dipergunakan kecuali untuk alat pertukaran dan mendapatkan keuntungan daripadanya. Bunga atau riba itu ialah

uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini termasuk di antara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri".

Menurut A.M. Saefuddin, para ekonom sekarang justru telah menyadari secara empirik bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul risiko berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi berbagai krisis sedangkan hal ini tidak akan terjadi bila si pemilik modal turut mengambil bagian dalam untung-rugi (*profit-loss-sharing*). Dan bunga tidak dapat membimbing ke arah pembentukan dan penanaman modal karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang kepada produksi yang terkandung di dalamnya di dalamnya.

Ekonom Lord Keynes berkesimpulan yang sama pula tentang bunga sebagai berikut: "Individu-individu itu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga, karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitir simpanannya. Sebab itu suku bunga tidak ditetapkan kecuali kelaziman belaka. Penyimpanan akan senantiasa berjalan terus meski suku bunga turun sampai nol". Keynes selanjutnya: "Suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan lalu secara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi".<sup>22</sup> Lord Boyd Orr menjelaskan pula: "Bunga adalah penyebab utama dari kegoncangan ekonomi dewasa ini, baik dalam bentuk krisis-krisis periodik atau sebagai

---

<sup>22</sup>Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi ...*, h. 75.

perbedaan yang mencolok dalam pembagian pendapatan nasional, atau menghambat jalan ke penanaman modal."<sup>23</sup>

Para ekonom muslim abad ke-XV Hijriyah merintis fungsionalisasi ekonomi bebas bunga dengan mendirikan Bank Islam, bank bebas bunga, yang melakukan segala kegiatan ekonomi yang lebih modern daripada bank-bank non-Islam yang konvensional. Sejak 1972 di berbagai negara telah berdiri 13 Bank Islam dan 9 lembaga keuangan non-Bank. Indonesia termasuk negara pendiri Bank Pembangunan Islam di Jeddah tahun 1975 dengan sahamnya sebesar US 25 juta dollar. Di Malaysia telah disetujui pendirian Bank Islam bebas bunga pada tahun 1982.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 76.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT A.M. SAEFUDDIN TENTANG NILAI-NILAI DASAR  
SISTEM EKONOMI ISLAM**

**A. Analisis Pendapat A.M. Saefuddin tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam**

Pendapat A.M. Saefuddin tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam, secara lengkapnya telah dikemukakan dalam bab ketiga skripsi ini. Oleh karena itu, di sini hanya dikemukakan substansi atau inti-intinya saja, bersamaan dengan itu sekaligus dianalisis.

Menurut A.M. Saefuddin nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam ada tiga, yang pertama yaitu nilai dasar pemilikan; kedua, keseimbangan; dan ketiga, keadilan.

Menurut A.M. Saefuddin nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam yang pertama yaitu nilai dasar pemilikan sebagai berikut:

“Pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak”.<sup>1</sup>

Pendapat A.M. Saefuddin di atas menunjukkan bahwa nilai dasar pemilikan sebagai nilai dasar sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Samudera, 1984, h. 20-21.



pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).<sup>2</sup>

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: ٣)

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Maidah: 3).

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.<sup>3</sup>

Secara kategoris sistem ekonomi yang beroperasi dalam aktivitas ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Karakteristik sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Perbedaannya tidak hanya dalam aspek normatif tetapi juga pada aspek teknis operasionalnya. Salah satu ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu adanya kebebasan memiliki harta secara perorangan. Tiap individu bebas menggunakan

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 2.

sumber-sumber ekonominya menurut apa yang dikehendakinya. Serta diberi kebebasan penuh untuk menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi barangnya. Sedangkan salah satu prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme yaitu kepemilikan harta dikuasai oleh negara, rantai ekonomi produksi, distribusi, perdagangan dan industri menjadi monopoli negara atau masyarakat keseluruhan. Individu tidak diberi peluang untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi.<sup>4</sup>

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial/politik, budaya, hukum, ekonomi dsb. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
2. Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
3. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan

---

<sup>4</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006, h. 69.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 85.

terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

4. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan adanya kesamaan ekonomi tapi mendukung dan menggalakkan terwujudnya tatanan kesamaan sosial. Kondisi ini mensyaratkan bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dimonopoli oleh segelintir masyarakat saja. Di samping itu, dalam sebuah negara Islam tiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan aktivitas ekonomi.
5. Adanya jaminan sosial bagi tiap individu dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara layak dan manusiawi. Menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Instrumen Islam mencegah kemungkinan konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang dan menganjurkan agar kekayaan terdistribusi pada semua lapisan masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah diatur oleh syariat.
6. Islam melarang praktek penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktek penimbunan Islam memberikan sangsi yang keras kepada para pelakunya.
7. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya.

Menurut A.M. Saefuddin nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam yang kedua yaitu keseimbangan sebagai berikut:

“Nilai dasar keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usaha diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara”.<sup>6</sup>

Pendapat A.M. Saefuddin di atas menjadi petunjuk bahwa nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam yang kedua yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an, antara lain, di dalam ayat-ayat berikut:

- QS.al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  
(القصص: ٧٧)

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

---

<sup>6</sup> Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 66.

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS.al-Qashash: 77).<sup>7</sup>

- QS. al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  
(البقرة: ٢٠١)

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. al-Baqarah: 201).<sup>8</sup>

Di samping kedua ayat itu, masih ada ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang mengemukakan hal tersebut, seperti surat al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, an-Najm ayat 29, al-Insaan ayat 27.

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan dunia saja.

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam ayat-ayat berikut:

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1996, h. 593.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 70.

- QS. al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(الحشر: ٧)

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. al-Hasyr: 7).<sup>9</sup>

- QS. al Maa'uun ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ... (الماعون: ١-٣)

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin” (QS. al Maa'uun: 1-3).<sup>10</sup>

- al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ٢٤-٢٥)

Artinya: “Dara orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. al-Ma'arij:24-25).<sup>11</sup>

Dari ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas

<sup>9</sup> Ibid., h. 915.

<sup>10</sup> Ibid., h. 1108.

<sup>11</sup> Ibid., h. 973.

berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum.

Menurut A.M. Saefuddin nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam yang ketiga yaitu keadilan sebagai berikut:

“Kata yang terbanyak disebut dalam Al Qur'an setelah "Allah", dan "ilmu pengetahuan", ialah "keadilan". Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali, menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, baik yang berkait dengan aspek sosial politik maupun sosial ekonomi. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat infak, sadakah (lihat Q.2:110, 271, 280, 4:8, 9:60, 24:33 27:26-27, 47:38, 57:7, 60:8, 70:24-25)”.<sup>12</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>13</sup> Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>14</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab ‘*adl*.<sup>15</sup>

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>16</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama

<sup>12</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai ...*, h. 24.

<sup>13</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 8

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, h. 448 – 449.

<sup>15</sup> M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 369.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 906.

lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>17</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>18</sup>

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).<sup>19</sup>

*Ihsan* (kebajikan) dinilai sebagai sesuatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau *ihsan*. *Ihsan* adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. *Ihsan* dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.

Imam Ali r.a. menegaskan, "adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan *ihsan* (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini tidak menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Aziz Dahlan, *et. al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 25

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, h. 30.

<sup>19</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 415

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003, h. 124.



Potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda, bahkan potensi dan kemampuan para rasul pun demikian (QS Al-Baqarah [2]: 253). Perbedaan adalah sifat masyarakat, namun hal itu tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Demikian kandungan makna firman-Nya pada surat Al-Hujurat (49): 13. Dalam surat Az-Zukhruf (43): 32 tujuan perbedaan itu dinyatakan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: ٣٢)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat saling mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Az-Zukhruf 43: 32).<sup>21</sup>

Setiap anggota masyarakat dituntut untuk *fastabiqul khairât* (berlomba-lombalah di dalam kebajikan) (QS Al-Baqarah [2]: 148). Setiap perlombaan menjanjikan "hadiah". Di sini hadiahnya adalah mendapatkan keistimewaan bagi yang berprestasi. Tentu akan tidak adil jika peserta lomba dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama. Tetapi, tidak adil juga bila setelah berlomba dengan prestasi yang berbeda, hadiahnya dipersamakan, sebab akal maupun agama menolak hal ini.

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى (النساء: ٩٥)

<sup>21</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 798

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak berjuang) kecuali yang uzur dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berjuang karena uzur) satu derajat. Dan, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan imbalan baik”.(QS Al-Nisa [4]: 95).<sup>22</sup>

...هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ... (الزمر: ٩)

Artinya: “Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS Al-Zumar [39]: 9).<sup>23</sup>

Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi, mempersamakan mereka dalam memperoleh kesejahteraan ekonomi, seperti adil dalam produksi, distribusi, konsumsi dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari menggunakan kata “adil” dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.136

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 747

<sup>24</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981, h. 53 – 56. Dalam tulisannya “*Rhetorica*”, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus. Lihat C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, h. 42

struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>25</sup> Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama di mana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan sekenanya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>26</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>27</sup>

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan ekonomi dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang

---

<sup>25</sup>Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia, 1988, h. 45

<sup>26</sup>Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995, h. 73.

<sup>27</sup>Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984, h. 224.

dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.

## **B. Realisasi Pendapat A.M. Saefuddin tentang Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam di Indonesia**

Menurut A.M. Saefuddin, dalam sistem ekonomi Islam dapat diungkap nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, sebagai berikut:<sup>29</sup>

### **1. Zakat**

Menurut A.M. Saefuddin, zakat adalah kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam. Zakat bukanlah pajak yang untuk menjamin penerimaan negara. Distribusi hasil pengumpulan zakat tertentu yaitu kepada delapan kelompok sasaran.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 74.

<sup>29</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai ...*, h. 26.

<sup>30</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi ...*, h. 71.

## 2. Pelarangan Riba

Menurut A.M. Saefuddin, hakikat pelarangan riba dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.<sup>31</sup>

## 3. Wakaf

Masalah wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam ternyata sudah diberdayakan di Indonesia. Di sejumlah negara lain, seperti Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, pemerintah, ulama dan masyarakat telah mendorong pengembangan instrumen wakaf. Untuk kepastian hukum, wakaf telah diaktualisasikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

## 4. Asuransi Syariah

Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Pendapat A.M. Saefuddin di atas menjadi petunjuk bahwa untuk mengukur sejauhmana realisasi pendapat A.M. Saefuddin adalah dengan melihat nilai instrumental yang strategis yaitu *pertama*, zakat, *kedua*, yaitu pelarangan riba,

---

<sup>31</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai ...*, h. 27.

*ketiga, wakaf, keempat, asuransi syariah*

## **1. Zakat**

Dalam Islam dikenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara Infak, Sedekah, Wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam.

Dalam perspektif A.M. Saefuddin ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam di Indonesia. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak dan wakaf. Pembagian dalam kegiatan wajib dan sukarela ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada sektor sukarela.

Sebagai salah satu nilai instrumental yang strategis dalam Islam, ZISWA merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan sistem ekonomi Islam ini mampu menjadi alternatif bagi sistem pasar yang ternyata menunjukkan berbagai masalah di dalam realisasinya. Jelas ini memerlukan kerja keras dari berbagai unsur keahlian untuk mewujudkannya apa yang dinamakan Sistem Ekonomi Islam.

Dalam konsep ekonomi Islam, zakat bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, dunia Islam dewasa ini kehilangan minimal dua hal

yaitu menghilangnya spirit religiositas dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat. Pertama, menghilangnya spirit religiositas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, hal ini menyebabkan dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang sangat vital. Kedua, tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode menyejahterakan rakyatnya.

Sebagai contoh, tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program kesejahteraan. Program kesejahteraan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan bencana yang meliputi kesehatan, pangan, balita, dan manula tidak dikenal dengan standar yang memuaskan di seluruh dunia Islam.

Menghilangnya religiositas dari panggung ketatanegaraan dengan sertamerta mengadopsi sekularisme dan materialisme yang tidak dipahami mendorong moralitas yang bobrok. Korupsi yang berupa perlawanan terhadap aturan legal (*mark up*, penyelewengan, pembobolan, komisi, dan sebagainya) sangat mencoreng dan memalukan dunia Islam. Korupsi yang legal menyangkut angka yang lebih besar lagi yaitu tidak dipahaminya visi dan misi pemerintahan dengan baik. Akibatnya 70 persen dana negara secara legal/sistematis tidak ditujukan kepada pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Dana-dana ini diizinkan secara legal untuk digunakan secara elitis dan bias kepada kekuasaan.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis zakat dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang

berkaitan dengan dampak kegiatan zakat di dalam suatu perekonomian dewasa ini belum banyak berkembang. Karena unsur zakat dalam sistem ekonomi konvensional bukan merupakan suatu variabel utama dalam struktur teori yang ada. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari pendapatan negara adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun pendapat A.M. Saefuddin belum sepenuhnya direalisasikan di Indonesia, karena tidak ada unsur zakat di dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi Pemerintah Indonesia. Namun zakat sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.

Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah diwujudkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam.

## **2. Pelarangan Riba**

Ada beberapa bagian penting dari pendapat A.M. Saefuddin yang perlu ditegaskan kembali untuk memudahkan dalam menganalisis pemikirannya. Beberapa bagian yang diungkap A.M. Saefuddin sebagai berikut:

- a. Bagi A.M. Saefuddin, bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutny:



"Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba"<sup>32</sup>

Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama lainnya, didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Al-Qur'an seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali 'Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Secara aqli menurut A.M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini.<sup>33</sup>

- b. Menurut A.M. Saefuddin, Islam mengharamkan seorang pengusaha mengambil sejumlah modal dari pihak lain, bank atau non bank, lalu membayar bunganya dengan kadar yang ditentukan, baik ia rugi atau untung.
- c. Menurut A.M. Saefuddin, Islam melarang seorang pedagang yang menjual barangnya melalui transaksi utang piutang yaitu yang dibayar kemudian dengan tambahan tertentu berupa bunga
- d. Menurut A.M. Saefuddin, bunga atau riba itu ialah uang yang lahir dari uang. Keuntungan semacam ini termasuk di antara bermacam keuntungan yang bertentangan dengan naluri
- e. Menurut A.M. Saefuddin, para ekonom sekarang justru telah menyadari bahwa riba mengandung kemudharatan, karena mengambil keuntungan tanpa memikul

---

<sup>32</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 72.

<sup>33</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai ...*, h. 27.

resiko sehingga berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga yang harus dibayar, sehingga terjadi krisis.<sup>34</sup>

Beberapa ahli yang pendapatnya sejalan dengan pandangan A.M. Saefuddin, di antaranya:

*Pertama*, Dawam Rahardjo yang menilai kalau bunga bank itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba.<sup>35</sup>

*Kedua*, pendapat yang sama juga dikemukakan Karnaen Purwaatmadja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan Islam di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogkan dengan keharaman minum minuman keras. Status keharamannya tidak bergantung sedikit atau banyaknya minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri, secara *aini* memang hukumnya haram. Lebih jauh ia mengatakan bahwa keharaman bunga bank disamakan dengan riba bukan karena besar atau kecilnya prosentase tingkat bunga, tetapi oleh karena penerapan atau penggunaan sistem prosentase itu sendiri yang mengandung unsur melipat gandakan.

*Ketiga*, pendapat senada juga dikemukakan Murasa Sarkaniputra, bahwa keharaman bunga uang sudah jelas petunjuknya dalam ajaran agama Islam. Pelarangan bunga bank juga berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh para filosof, seperti Socrates dan Aristoteles yang menilai bahwa "uang dianggap bagaikan ayam betina yang tidak bertelur.

Pandangan mengenai bunga bank dikemukakan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama

---

<sup>34</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi ...*, h. 73-76..

<sup>35</sup> Untuk meneliti lebih luas pandangan Dawam Rahardjo dapat dilihat dalam karyanya Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 594 – 617.

(NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut memberikan fatwa melalui lembaga-lembaga fatwa yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa dari masing-masing organisasi.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya, suatu lembaga yang ada dalam struktur organisasi Muhammadiyah yang menangani aspek hukum Islam dan memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, telah melakukan pengkajian dan memberikan fatwa yang menyangkut ekonomi dan keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan.

Pada sidang Majelis Tarjih tahun 1968 dan 1972, Muhammadiyah mengeluarkan pendapat organisasi tentang perbankan dan persoalan yang berkaitan dengan bunga bank. Sedangkan yang berkaitan dengan bidang keuangan secara umum dikeluarkan pada tahun 1976, dan koperasi simpan pinjam tahun 1989.<sup>36</sup>

Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan riba dalam praktek perekonomian umat Islam, namun masalah bunga bank dianggapnya sebagai *al-mas'alah al-ijtihadiyyat*, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang baru, belum ada pada masa awal Islam. Sehingga keterkaitan antara bunga bank dengan riba yang diharamkan menjadi persoalan yang memerlukan ijtihad.

Dalam kaitan itu, Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga bank dari bank-bank milik pemerintah hukumnya syubhat. Sedangkan bunga bank dari bank-bank milik swasta diharamkan. Keputusan ini diambil ketika sidang Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1969, memutuskan sebagai berikut:

1. Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur'an dan sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

---

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 62

3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mutasyabihat*.

Hukum *mutasyabihat* terhadap bunga bank milik pemerintah menurut pandangan Muhammadiyah didasarkan atas pertimbangan dalam sidang Majelis Tarjih tersebut, sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam adalah sifat pembunga yang disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedangkan yang berlaku dewasa ini sama sekali tak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang bersangkutan. Dan hal itu hanya mungkin berlaku pada bank milik pemerintah. Pandangan ini sesuai dengan konteks pada saat itu di mana tingkat suku bunga pada bank, khususnya bank pemerintah ditentukan pemerintah melalui undang-undang.

*Kedua*, bank negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di dalam kemakmurannya. Bunga yang dipungut dalam sistem pengkreditannya sangat rendah sehingga sama sekali tak ada pihak yang dikecewakan.

Perbedaan keputusan hukum bunga bank pemerintah dan swasta tersebut berkaitan dengan misi yang diemban bank pemerintah berbeda dengan bank swasta, di samping tingkat suku bunga bank pemerintah lebih rendah dari bank swasta.

Keputusan Majelis yang berkaitan dengan hukum bunga koperasi simpan-pinjam dibahas pada sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang tahun 1989. Majelis memutuskan bahwa koperasi simpan-pinjam hukumnya mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba. Asalkan

tambahan pembayaran tersebut memperhatikan beberapa faktor, di antaranya tidak melampaui laju inflasi.<sup>37</sup>

Melihat pandangan dan pendapat A.M. Saefuddin dan para ahli lainnya tersebut, maka penulis setuju dengan pikiran dan argumentasi yang dikemukakan oleh AM. Saefuddin, yaitu setuju bahwa bunga itu identik dengan riba alasannya sebagai berikut:

- a. Bunga, besar atau kecil mengandung unsur eksploitasi (penghisapan) oleh si kaya pada si miskin
- b. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya
- c. Bunga mengandung unsur keterpaksaan bagi si peminjam dalam membayar bunga pinjaman. Meskipun pada waktu dibuat akad atau transaksi ada kesepakatan, namun kesepakatan si peminjam merupakan kesepakatan terselubung. Masalahnya akan menjadi jelas pada waktu si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya atau usahanya mengalami kemunduran maka ketika jatuh tempo akan menjadi masalah yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman berikut bunganya.

Menurut penulis bila bunga bank tidak diharamkan maka masalahnya menjadi rumit. Karena bank Islam saat ini sudah berdiri dengan baik, maka ia akan goyah jika berpegang teguh pada pendapat yang menghalalkan bunga bank.

Pendapat yang menghalalkan bunga bank sangat kontradiktif karena jarang sekali kalau tidak boleh dikatakan tidak ada orang atau lembaga yang mengulurkan pinjaman hanya atas dasar menolong tanpa mencari keuntungan. Selain itu logika

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 62-63

para ahli yang menghalalkan bunga bank kurang logis, dikatakan demikian karena mereka tidak bisa memberi ukuran yang pasti tentang batasan bunga yang wajar dan bunga yang mengandung unsur eksploitasi.

Karena itu pendapat yang menghalalkan bunga bank mungkin lebih tepat menghalalkan bunga bank pada saat belum ada bank Islam, ini mungkin bisa dikategorikan darurat. Tapi saat ini kondisi darurat sudah tidak bisa dijadikan alasan karena setiap orang bisa menjadi nasabah bank Islam. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa pemikiran yang menghalalkan bunga bank sudah tidak relevan lagi.

Menurut penulis bahwa pendapat A.M. Saefuddin sangat berdampak positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi terutama untuk golongan ekonomi lemah akan makin terlindungi. Dampak positifnya yaitu:

1. Bank Islam akan makin diminati sebagai alternatif untuk menghindari bunga
2. Para peminjam uang tidak merasa dihantui dalam membayar pinjamannya
3. Para pengusaha kecil seperti kerajinan tangan dapat mengembangkan usahanya melalui pengajuan kredit yang tanpa didasari bunga. Dengan kata lain akan merangsang pengusaha kecil melebarkan usahanya melalui pinjaman.

Karena itu pendapat A.M. Saefuddin tidak hanya menguntungkan kaum yang lemah modal tapi juga menyelamatkan ekonomi bangsa.

Seperti diketahui, dilihat dari aspek ekonomi, praktek bunga berimplikasi secara negatif kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam praktek bunga ada pihak kreditur yang mengambil keuntungan tanpa memikul resiko. Ini berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis.

Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan ekonomi seperti pembengkakan hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen ini.

Bunga juga tidak membimbing ke arah pembentukan dan penanaman modal, investasi riil, karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang pemberian pinjaman itu digunakan untuk sektor produksi mana. Uang bukan hanya sekedar sebagai alat pembayaran, tapi dijadikan komoditi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendapat A.M. Saefuddin tentang pelarangan riba sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam, tampaknya sudah direalisasikan. Hal itu terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syari'ah, kontrak syariah, perseroan syariah, investasi syariah, reksadana syariah, dan aktivitas ekonomi lainnya dengan perspektif syari'ah.

### 3. Wakaf

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>38</sup>

Dalam *Fiqh Islam*, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja

---

<sup>38</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 1

asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.<sup>39</sup> Dari berbagai rumusan tentang wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang mengandung nilai ibadah saja, ada yang mengandung nilai sosial saja dan ada pula yang mengandung keduanya. Salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan juga sosial adalah ajaran tentang wakaf. Dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu motivasi wakaf adalah *taqarrub* kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali-Imran: ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali-Imran: ayat 92).<sup>40</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan umatnya agar suka berderma atau menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau sarana-sarana lain karena pahalanya dapat terus menerus mengalir selama benda wakaf itu masih ada serta dapat diambil manfaatnya. Sebagaimana diterangkan oleh hadis :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>39</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 26.

<sup>40</sup>Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989, h. 91.



قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)<sup>41</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

#### 4. Asuransi Syariah

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri, dan pertanian skala besar.<sup>42</sup> Asuransi, pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.<sup>43</sup>

Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi *takaful*, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

---

<sup>41</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, Juz III, h. 73.

<sup>42</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, Terj. Ta'lim Musafir, "Asuransi di dalam Islam", Bandung: Pustaka, 1987, h. 1.

<sup>43</sup> Mohammad Muslehuddin, *Insurance in Islam*, Terj. Wardana, "Asuransi dalam Islam", Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 3.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar lima persen akan dimasukkan ke dana peserta. Ini sebagai tabungan bila terjadi klaim peserta secara tiba-tiba. Dana yang sebesar lima persen itu disebut dana *tabarru*. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.<sup>44</sup>

Sisanya sebanyak 95% akan segera ditanamkan di sejumlah portofolio investasi yang sesuai dengan syariah Islam, yakni saham, reksa dana syariah, dana penyertaan langsung, dana talangan, deposito, serta hipotek. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana itu akan dibagikan kepada peserta dengan sistem bagi hasil. Nisbahnya berkisar 70% untuk perusahaan asuransi dan 30% untuk peserta.

Proporsi ini bisa meningkat menjadi 60: 40 bila saja hasil investasi meningkat dengan tajam. Ini berlaku untuk semua produk asuransinya. Inilah yang membedakan dengan produk asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional keuntungan ini menjadi milik perusahaan asuransi.

Dari ilustrasi itu, nilai keuntungan yang akan diperoleh peserta sangat tergantung pada kecerdikan manajemen investasi mengelola duit nasabah. Dalam kondisi biasa-biasa saja, potensi keuntungan yang akan diraup bisa mencapai delapan persen per tahun. Namun jika hasilnya sedang bagus, peserta bisa meraih keuntungan hingga 16 %. Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 299.

syariah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional nonsaving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.<sup>45</sup>

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60: 40 atau 70: 30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Wirdyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 233.

<sup>46</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al, *op.cit.*, h. 300.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut A.M. Saefuddin nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam ada tiga, yang pertama yaitu nilai dasar pemilikan; kedua, keseimbangan; dan ketiga, keadilan. *Pertama*, nilai dasar pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. *Kedua*, nilai dasar keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). *Ketiga*, nilai dasar keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat infak, sadakah.
2. Realisasi pendapat A.M. Saefuddin di antaranya telah terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat, pelarangan riba, undang-undang tentang wakaf, dan asuransi syariah. Walaupun pendapat A.M. Saefuddin tentang zakat sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi

Islam belum sepenuhnya direalisasikan di Indonesia, karena tidak ada unsur zakat di dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi Pemerintah Indonesia. Namun zakat sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.

Pendapat A.M. Saefuddin tentang pelarangan riba sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam, tampaknya sudah direalisasikan. Hal itu terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syari'ah, kontrak syariah, perseroan syariah, investasi syariah, reksadana syariah, dan aktivitas ekonomi lainnya dengan perspektif syari'ah.

## **B. Saran-saran**

Perguruan tinggi hendaknya membuka akses pada peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam lagi tentang nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1980.
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, USA: The Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore, 1990.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Anonimous. *Ekonomi Pancasila untuk Mendukung Tinggal Landas dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jakarta: Lemhannas, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Arkound, Mohammad, *Rethinking Islam*, terj. Yudian W.Asmin dan Lathiful Khuluq, Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996.
- Bablily, Mahmud Muhammad, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.
- Chapra, Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Dunya, Syauqi Ahmad, *Sistem ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2007.
- Fronzizi, Riseri, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2012.
- Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- Kattsof, Louis, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Langeveld, *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Jakarta; PT.Pembangunan, tth.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV. Pustaka. Setia, 2009.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- , *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1981
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Praja, Juhaya S., *Aliran – Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahardjo, Dawam, et. al. (Penyunting), *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1989.
- , *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Saefuddin, Ahmad.M., *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Samudera, 2007.
- , *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- , *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, 1990.
- , *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: CV Adipura, 2004.
- Sugeng, Pamudji dengan judul: “Kembali Pada Sistem Ekonomi Islam, Penyadaran Secara Komprehensif”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2013.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.



Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia, 1988.

Syhabudi: “Pemikiran dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Hermeneia Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 April 2014.

Tadjoedin, Achmad Ramzy, dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Waca, 1992.

Toha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1996.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.

Zaini, Nur, “Hubungan Sistem Ekonomi Islam dengan Peranan Bank Sentral dalam Sistem Moneter Islam Menurut Muhamamd Umer Chapra”, Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.